



ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320

Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

AP2I

Nomor : 059/Ketum/PN-AP2I/09/2019
Sifat : SANGAT SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Risalah dan Kesepakatan Rapat Kerja
Pengurus Nasional AP2I, 26 September 2019

Jakarta, 30 September 2019

Kepada Yth.:

Para Anggota AP2I Pusat dan Daerah

di

T e m p a t

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Kerja Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) pada tanggal 26 September 2019 di Savera Hotel Depok, yang dihadiri oleh pengurus nasional AP2I dan perwakilan dari komisariat kementerian/lembaga dan komisariat wilayah/daerah, berikut ini disampaikan risalah dan kesepakatan Rapat Kerja dimaksud, untuk menjadi periksa dan perhatian serta tindak lanjut dari seluruh anggota AP2I.

1. Rapat Kerja Pengurus Nasional AP2I tanggal 26 September 2019 membahas 4 (empat) agenda utama, yaitu: (i) laporan kemajuan pelaksanaan tugas Pengurus Nasional AP2I tahun 2019 hingga semester III; (ii) persiapan penyelenggaraan Munas Khusus AP2I dalam rangka penetapan dan pengesahan perubahan AD/ART AP2I menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI); (iii) kemajuan penyusunan rancangan PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Perencana yang merupakan revisi KepmenPAN No. 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; dan (iv) kemajuan persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Pembangunan Indonesia (LSP-PPI).
2. Terkait dengan laporan kemajuan pelaksanaan program kerja PN-AP2I sampai dengan triwulan III tahun 2019, dapat disepakati bahwa pengurus nasional akan menyiapkan secara lengkap hasil pelaksanaan program kerja masing-masing unsur pengurus, untuk dilaporkan pada forum Munas Khusus AP2I dan rencana transisi kepengurusan AP2I menjadi PPPI yang akan dilaporkan pada forum Rapat Kerja Nasional PPPI pada kesempatan berikutnya.
3. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Munas Khusus AP2I dalam rangka penetapan dan pengesahan perubahan AD/ART AP2I menjadi PPPI, disepakati oleh seluruh pengurus nasional dan komisariat AP2I untuk dapat diselenggarakan paling lambat pada tanggal 12 November 2019, yang untuk mendapatkan persetujuan dan kesepakatan 2/3 dari anggota yang telah terdaftar akan didukung melalui voting secara virtual melalui online survey, dengan mempertimbangkan bahwa hingga tanggal 25 September 2019 baru 361 orang yang telah mendaftar ulang dan mendaftar baru melalui situs web www.perencanapembangunan.or.id sementara AD/ART menetapkan persyaratan bahwa Munas Khusus untuk penetapan perubahan AD/ART perlu mendapatkan persetujuan dari 2/3 anggota yang hadir, yang setidaknya separuh dari jumlah anggota dapat hadir pada Munas Khusus. Untuk itu, survei daring akan segera diluncurkan pada awal Oktober dan akan ditutup pada minggu kedua atau ketiga Oktober 2019, dengan tetap melakukan update jumlah anggota yang mendaftar secara daring melalui situs web.
4. Selanjutnya dalam kaitannya dengan agenda perubahan KepmenPAN 16/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, sebagaimana disampaikan oleh Kapusbindiklatren KemenPPN/Bappenas dan Asdep Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur KemenPANRB, dapat disepakati bahwa rancangan akhir dari



ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320

Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

AP2I

- PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Perencana yang telah disesuaikan melalui proses penyusunan yang panjang dan telah memperhatikan perubahan berbagai kerangka regulasi yang berlaku, akan segera diproses finalisasinya pasca forum uji publik yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2019 sebagai rangkaian dan lanjutan dari Rapat Kerja PN-AP2I, dan akan segera ditindaklanjuti oleh Pusbindiklatren KemenPPN/Bappenas bersama KemenPAN RB dan BKN untuk dapat ditandatangani pada bulan Oktober 2019.
5. Sehubungan dengan rencana pembentukan LSP-PPI yang selama ini telah diinisiasi Pusbindiklatren KemenPPN/Bappenas dengan melibatkan PN-AP2I secara aktif, disepakati akan dilanjutkan segera melalui penyusunan rancangan PermenPPN/Kepala Bappenas tentang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Perencanaan Pembangunan, yang mengacu kepada Permenaker Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang akan dijadikan pedoman operasionalisasi LSP-PPI, yang disepakati akan segera dibentuk kelembagaannya dalam waktu dekat, untuk dapat diluncurkan secara resmi pada saat Rakernas PPPI yang direncanakan pada tanggal 13 November 2019, sebagai rangkaian dari acara Konferensi Nasional JFP dan Temu Alumni Pusbindiklatren yang diagendakan pada tanggal 13-14 September 2019 di Jakarta.
 6. Dengan memperhatikan butir (3) terkait rencana penyelenggaraan Munas Khusus AP2I, disepakati akan dibahas 4 (empat) agenda, yaitu: (i) persetujuan anggota atas pengesahan perubahan AD/ART AP2I; (ii) persetujuan anggota atas pengesahan perubahan AP2I menjadi PPPI; (iii) persetujuan anggota atas perubahan struktur kepengurusan nasional PPPI; dan (iv) persetujuan anggota atas rencana pengukuhan kepengurusan nasional PPPI. Sesuai kesepakatan, maka sebelum penyelenggaraan Munas Khusus akan diluncurkan survei daring untuk seluruh anggota memberikan suaranya (pemungutan suara secara daring) sebagai alternatif penjangkauan suara anggota terhadap ke-empat agenda di atas, yang akan melengkapi kesepakatan dan persetujuan anggota yang dapat hadir langsung pada saat Munas Khusus, yang kepastian waktunya akan ditetapkan melalui undangan yang akan disampaikan pada bulan Oktober 2019, yang direncanakan penyelenggaraannya paling lambat pada tanggal 12 November 2019, sebelum pelaksanaan Rakernas PPPI pada tanggal 13 November 2019.
 7. Sebagai tindak lanjut dari keenam butir di atas, maka PN-AP2I akan segera melakukan koordinasi dan konsolidasi baik secara internal pengurus maupun secara eksternal dengan lembaga terkait, terutama Pusbindiklatren KemenPPN/Bappenas selaku instansi pembina AP2I atau instansi pengawas PPPI sesuai regulasi yang baru, dan akan tetap berkonsultasi dan menerima masukan dari seluruh anggota AP2I, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam rangka transisi perubahan dari AP2I menjadi PPPI, termasuk penyesuaian dan pematapan kelembagaan dan program kerja PPPI lebih lanjut dalam masa kerja hingga 2021 mendatang.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, SALAM PERENCANA.

Ketua Umum,

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.

Tembusan Yth:

1. Sesmen PPN/Sestama Bappenas (Ketua Dewan Pembina AP2I/Badan Pengawas PPPI);
2. Kepala Pusbindiklatren (Anggota Dewan Pembina AP2I/Badan Pengawas PPPI);
3. Sekretaris Jenderal AP2I/PPPI;
4. Pengurus Nasional AP2I/PPPI.